

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA
ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan pelantikan pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab kendaraan dinas operasional Unit Kerja Eselon II pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Barang tentang Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penetapan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja Eselon II Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Eselon II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Unit Kerja Eselon II dengan ketentuan:

- a. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional dinas maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kerusakan kendaraan dinas yang disebabkan karena penggunaan diluar kepentingan dinas maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Februari 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA
ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Februari 2018

PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA ESELON II
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN	UNIT KERJA	KENDARANAAN		
				JENIS	MERЕК/TYPE	NO POLISI
1	R. Adha Pamekas	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1320 SQN
2	Rusli Maryadi	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1321 SQN

3	Selamet Budiarto	Kepala Bagian Sistem Informasi	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1322 SQN
4	Tjipto Prasetyo Nugroho	Kepala Bagian Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1323 SQN
5	Irawaty Imran	Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1324 SQN
6	Raden Ari Widiyanto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1325 SQN
7	Ria Agustina Nasution	Kepala Subdirektorat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan	Direktorat Pengembangan Profesi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1326 SQN
8	Wisnu Setyo Wijoyo	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1327 SQN
9	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1328 SQN
10	Ranto	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1330 SQN

11	Angga Widita Amirul	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1331 SQN
12	Muhammad Firdaus	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	Direktorat Sertifikasi Profesi	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1332 SQN
13	Ichwan Makmur Nasution	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1334 SQN
14	Andi Susanto	Kepala Bagian Hukum dan Humas	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1335 SQN
15	Hermawan	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1336 SQN
16	Eko Rinaldo Octavianus	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1337 SQN
17	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Nissan/Grand Livina	B 1341 SQN
18	Moch Zaini	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/ Kijang Innova	B 1732 SQN
19	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Kepala Bagian Keuangan	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/ Kijang Innova	B 1733 SQN

20	Ari Sulindra	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/ Kijang Innova	B 1734 SQN
21	Yasip Khasani	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Toyota/ Kijang Innova	B 1735 SQN

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA BARANG,

ttd

SALUSRA WIDYA